

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan privatisasi telah dilakukan sejak era Soeharto begitu juga pada pemerintahan di awal reformasi, meski demikian akan tetapi di era SBY privatisasi dilakukan secara besar-besaran dengan dukungan oleh para politisi di kabinetnya. Pada dasarnya privatisasi merupakan salah satu kunci dari sistem ekonomi globalisasi dan dari kebijakan privatisasi tersebut meliputi komersialisasi atas layanan publik, eksploitasi sumber daya alam yang seharusnya milik negara seperti air, udara dan keanekaragaman hayati tetapi hal tersebut justru dijual kepada asing. Selain itu fakta menunjukkan bahwa pemodal asing telah menguasai hampir 85 persen kepemilikan saham BUMN di Indonesia dan lebih dari separuh kepemilikan perbankan, hampir 90 persen dari 137 konsesi pengelolaan lahan migas di Indonesia juga sudah dikuasai oleh korporasi asing. Dalam skripsi ini telah menjelaskan berbagai hal yang disimpulkan sebagai berikut.

Privatisasi dilakukan secara masif pada era SBY dengan menjual puluhan BUMN kepada asing maupun swasta sehingga dampaknya adalah privatisasi merugikan bagi masyarakat secara luas sehingga hal ini penting untuk diteliti. Kebijakan privatisasi sejatinya sudah dilakukan sebelum pemerintahan SBY seperti pemerintahan Soeharto yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Freeport sehingga perusahaan tersebut dapat masuk ke Indonesia dengan melakukan privatisasi dan mengeksploitasi alam di Papua dilanjutkan dengan perjanjian kontrak karya bersama Soeharto dengan disahkannya undang-undang no. 1 tahun 1967 yang memberikan izin kepada Freeport untuk mendirikan perusahaannya selama 30 tahun. Privatisasi di era Soeharto ini lebih condong kepada privatisasi di sektor Gas bumi dan pengilangan minyak.

Namun ketika pemerintahan di era Habibie, privatisasi tidak dilakukan karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi Indonesia pada saat itu lebih difokuskan kepada penyelamatan rupiah dengan Habibie mengesahkan undang-undang anti monopoli dan pada pemerintahan Habibie ini pula IMF mampu mengintervensi dan memiliki peran atas kebijakan ekonomi di Indonesia, karena pada saat itu Habibie melakukan utang kepada IMF dan Bank Dunia maka segala peraturan terkait ekonomi dibawah bimbingan IMF. Di lain pihak pemerintahan Gus Dur tidak masif untuk melakukan privatisasi, walaupun hanya beberapa BUMN saja yang di privatisasi tetapi tetap saja Gus Dur melibatkan asing untuk peningkatan ekonomi di Indonesia yang mengutamakan diplomasi ekonomi dengan sering mengunjungi negara-negara di sekitar Asean ataupun Eropa untuk mengundang investor menanamkan modalnya ke Indonesia.

Tetapi privatisasi justru masif dilakukan di era Megawati dengan menjual 7 BUMN pada awal pemerintahannya kepada asing, selain itu Megawati juga menjual BUMN yang dinilai strategis serta menguntungkan Indonesia dan yang paling di sorot pada saat itu yaitu PT. Indosat yang dijual kepada Singapura atas saran dari IMF karena pada saat itu IMF berperan untuk mengintervensi kebijakan ekonomi karena setelah Megawati melakukan perjanjian dengan IMF maka dari itu segala kebijakan ekonomi yang direkomendasikan IMF pun diterapkan seperti paham ekonomi liberal yang meliputi deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi selain itu pemerintahan Megawati beralasan melakukan privatisasi karena tujuan penyelamatan ekonomi.

Pada pemerintahan selanjutnya SBY-Kalla kembali melakukan privatisasi untuk membayar hutang negara terhadap IMF dan mengikuti semua prasyarat bantuan yang diberikan seperti yang sudah dijelaskan di skripsi ini telah memaparkan tentang kebijakan Sby-Kalla yaitu sebagai berikut:

Pertama; pada awal pemerintahannya SBY melakukan kebijakan dengan mensubsidi bahan bakar minyak atau dengan kata lain menaikkan bahan bakar minyak dan secara bersamaan SBY telah melunasi utang Indonesia ke IMF tetapi walaupun utang tersebut sudah dilunasi SBY tetap menerapkan paket kebijakan dari IMF yaitu melakukan privatisasi yang merupakan bagian dari sistem ekonomi neoliberal. Kebijakan kedua; SBY mengesahkan undang-undang tentang privatisasi, membuat komite privatisasi, dan undang-undang tentang penanaman modal asing yang membuat privatisasi semakin gencar dilakukan dan akibatnya privatisasi dapat dilakukan secara sistemik. Ketiga; selama era SBY privatisasi banyak dilakukan kepada puluhan BUMN. Kebijakan SBY selanjutnya adalah membuat UKP3R, yaitu unit kerja bentukan presiden yang diberi tugas selama sisa pemerintahan SBY untuk meningkatkan kinerja BUMN namun konsultan dari unit ini justru berasal dari asing yang turut mengawasi BUMN di Indonesia setelah IMF tidak bisa lagi terlibat di kebijakan ekonomi Indonesia setelah utang dilunasi.

Kebijakan privatisasi SBY ini didukung oleh para politisi yang memegang jabatan di kabinetnya. Selain itu orang-orang di kabinet SBY ini di isi oleh pihak yang mendukung privatisasi, menteri BUMN pada saat itu berpendapat jika dilakukan privatisasi maka utang Indonesia ke IMF bisa lunas, namun dengan utang yang telah dilunasi justru tidak membuat pemerintah menghentikan privatisasi. Terkait undang-undang tentang penanaman modal asing menjadikan pemodal asing tidak lagi dibatasi sehingga perpanjangan kontrak dengan perusahaan asing yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia bisa lebih lama. Selain itu ketika BUMN tersebut telah di privatisasi, SBY mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang telah di privatisasi itu di beli kembali guna mengembalikan

kepercayaan masyarakat karena terlalu banyak BUMN yang telah di privatisasi.

Kebijakan privatisasi di era SBY ini menjadi program tahunan yang dilakukan selama pemerintahannya dengan melibatkan menteri BUMN, menteri keuangan, dan DPR untuk memproses perusahaan yang akan di privatisasi atas rekomendasi dari menteri keuangan dengan dalih agar ekonomi semakin berkembang dan privatisasi menjadi cara agar defisit APBN bisa diatasi dengan melakukan penjualan atau memprivatisasi suatu BUMN. Selanjutnya pemerintahan SBY menerapkan kebijakan yang merugikan negara demi menarik investor asing agar tertarik ke Indonesia yaitu dengan mengurangi pajak kepada perusahaan multinasional dan dengan di terapkannya kebijakan tersebut maka pendapatan negara pun ikut merosot, dari kerugian tersebut SBY justru menaikkan pajak agar menutupi APBN.

Dengan banyaknya melakukan privatisasi BUMN pemerintah SBY mempunyai alasan untuk menerapkan program privatisasi tersebut yaitu pemerintah menilai jika BUMN dialihkan kepada swasta atau asing maka akan ada daya bersaing yang sama antara BUMN dan swasta. Selain itu dengan pengalihan BUMN ke swasta maka tidak akan ada ketimpangan antara BUMN dan swasta dalam mengelola industri di Indonesia dan jika pemerintah menjual aset BUMN ke swasta dalam negeri akan timbul sinergi antara BUMN dan pengusaha swasta di dalam negeri. Di samping itu BUMN tidak bisa melaksanakan proyek sendiri tanpa adanya bantuan, maka dari itu swasta dilibatkan agar membantu BUMN mengerjakan proyek atau pelaksanaan industri yang tidak bisa BUMN kerjakan.

Pemerintah juga menilai jika BUMN yang dimiliki negara dapat bekerja sama dengan swasta maka peran pemerintah ketika mengatur pengelolaan anggaran BUMN dapat berkurang, dalam hal membantu teknologi baru yang sudah digunakan oleh pihak swasta dalam mengelola industri

atau suatu badan usaha. Jadi, dengan kerjasama tersebut BUMN maupun swasta diharapkan dapat saling transfer teknologi yang efisien dan pemerintah menganggap dengan mengalihkan kepemilikan BUMN ke swasta maka pemerintah tidak harus terus mengelola BUMN dalam hal anggaran dan swasta dalam hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mensubsidi pendanaan tersebut ke sektor lain sehingga pemerintah mampu memberikan anggaran secara merata di semua sektor dengan tidak terpaku kepada BUMN saja.

Selanjutnya pemerintah menilai privatisasi harus dilakukan dengan menjual saham BUMN ke publik agar masyarakat mampu merasakan hasil dari keuntungan sebuah BUMN selain itu karena pemerintah menilai agar BUMN mandiri untuk mencari pendanaan dan tidak selalu tergantung kepada pemerintah sehingga BUMN dapat bersaing di pasar nasional maupun pasar internasional. Penjualan saham ke publik pun dinilai dapat meningkatkan target dividen kepada negara sekaligus dapat menyehatkan BUMN, di samping itu pemerintah menilai ketika BUMN sudah terdaftar di bursa maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sehingga dari situ ada kontrol penuh publik untuk mengawasi BUMN yang telah di privatisasi. Selain itu ketika BUMN sudah di bursa maka pemerintah menyebutkan bahwa asing maupun pengusaha swasta dapat meningkatkan kesejahteraan BUMN.

Pemerintah menganggap privatisasi sebagai program yang dapat membantu menangani defisit APBN selain itu pemerintah pun menyebutkan bahwa swasta justru menyumbang lebih banyak ke negara dibandingkan BUMN dan dari situ peran swasta sangat diperlukan. Ketika privatisasi dilakukan, di sisi lain pemerintah akan mendapatkan dana segar untuk penambahan modal BUMN yang di privatisasi, pengembangan usaha ataupun keperluan investasi lainnya serta sisanya bisa dibelanjakan sesuai keperluan publik. Pemerintah tidak perlu lagi untuk

menaikkan pajak karena harus menambal defisit APBN dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah beranggapan bahwa program privatisasi adalah kebijakan yang tepat yang harus diterapkan oleh pemerintah demi penyehatan BUMN dan demi perekonomian negara.

Setelah pemerintah melakukan privatisasi justru pihak diuntungkan dari privatisasi hanya pihak-pihak tertentu dan bukan kepada masyarakat luas, pihak yang diuntungkan dari privatisasi tersebut adalah para politisi yang memegang jabatan di lingkungan BUMN dan keuntungan yang didapat pun hanya di kalangan pengusaha dan orang-orang yang terlibat ketika privatisasi itu dilakukan. Selain itu ketika asing telah membeli saham atau kepemilikan saham secara mayoritas tentu saja dengan begitu mereka mengantongi banyak keuntungan dari privatisasi. Asing yang telah mempunyai saham mayoritas di perusahaan BUMN, mereka hanya mengawasi saja perusahaan tersebut dari negara asal mereka dan mendirikan perusahaan tersebut di negara yang bebas pajak. Sehingga segala aspek tentang perusahaan tersebut baik sarana ataupun prasarananya dapat dengan mudah sepenuhnya dikuasai atau di kelola oleh asing.

Privatisasi hanya bermanfaat bagi pelaku privatisasi saja sedangkan masyarakat dirugikan dengan adanya privatisasi seperti lahan yang harus di jual ke pemerintah asing, adanya kesenjangan antara pemilik usaha yang dibantu oleh swasta dan pelaku industri kecil yang independen tanpa ada bantuan dari pemerintah. BUMN yang dikelola asing maupun swasta mendapatkan suntikan modal yang besar, sedangkan BUMN yang mengalami kebangkrutan terpaksa harus dijual ke swasta dan dikelola oleh swasta yang mengakibatkan jumlah pengangguran menjadi bertambah karena besarnya pemecatan dari BUMN yang bangkrut. Selain itu ketika sebuah BUMN atau pelayanan publik di sudah privatisasi dan di ambil alih oleh swasta maupun asing, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun menurun karena biaya yang di bebankan

kepada masyarakat terlalu mahal. Selain itu dengan penerapan privatisasi di kebijakan ekonomi SBY membuktikan bahwa sistem ekonomi yang diterapkannya cenderung beraliran neoliberal.

Privatisasi tidak menguntungkan bagi masyarakat secara umum, pengetahuan masyarakat tentang privatisasi pun demikian minim sehingga ketika pemerintah menyebutkan alasan untuk memprivatisasi adalah agar masyarakat bisa menikmati hasil dari keuntungan BUMN yang faktanya hal tersebut keliru sebab masyarakat bahkan yang dapat menikmati keuntungan dari BUMN hanya dari golongan politisi, swasta dan orang-orang disekitar SBY saja. Secara tidak langsung privatisasi tidak ditujukan untuk masyarakat secara luas karena daya saing masyarakat yang lemah ketika sebuah BUMN telah dikuasai oleh asing, hal itu mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak bisa mandiri karena terus melibatkan asing dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian skripsi ini dibuat berdasarkan dari penelitian ilmiah dan data yang bersumber dari jurnal, buku, ataupun website berita terkait kebijakan privatisasi pada periode Sby-Kalla.